

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima : 8 Januari 2024

Disetujui : 26 Januari 2024

KEPENDUDUKAN

PENYEBAB KEPADATAN PENDUDUK DI PEMUKIMAN KUMUH KOTA PALEMBANG**Wahyu Saputra^{1*}, Sukmaniar², Mirna Taufik²**¹ Program Studi Sains Lingkungan, FST, Universitas PGRI Palembang² Program Studi Pendidikan Geografi, FKIP, Universitas PGRI Palembang(✉) * wahyusaputra@univpgri-palembang.ac.id**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penyebab kepadatan penduduk di permukiman kumuh Kota Palembang. Adapun objek dan lokasi penelitian ini yaitu masyarakat yang ada di permukiman kumuh Kota Palembang. Metode pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Pengumpulan data pada penelitian ini yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data pada penelitian ini yaitu dengan reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepadatan penduduk di permukiman kumuh dipengaruhi oleh lima faktor utama yaitu faktor pekerjaan dalam meningkatkan ekonomi, faktor daya beli lahan, daya beli rumah, faktor kenyamanan di wilayah permukiman kumuh, dan faktor harga lahannya di wilayah permukiman yang rendah. Sehingga pentingnya bagi masyarakat untuk mempersiapkan segala sesuatu guna mengatasi keterpaksaan bertempat tinggal di permukiman kumuh. Persiapan yang matang sebelum melakukan migrasi ke kota dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi peningkatan jumlah penduduk di permukiman kumuh. Pemerintah juga harus mempersiapkan wilayah perumahan yang sesuai dengan kemampuan masyarakat atau rumah dengan nilai jual yang ekonomis.

Kata Kunci: *Kepadatan Penduduk, Permukiman Kumuh***ABSTRACT**

This study aims to explain the causes of overcrowding in the slum settlements of Palembang City. The object and location of this research are the people in the slum settlements of Palembang City. The method in this study is a qualitative method. Collecting data in this study is through observation, interviews, and documentation. Data analysis in this study is by data reduction, data presentation and conclusions. The results showed that the population density in slums was influenced by five main factors, namely the work factor in improving the economy, the purchasing power of land, the buying power of houses, the convenience factor in slum areas, and the low price of land in residential areas. So it is important for the community to prepare everything in order to overcome the compulsion to live in slums. Careful preparation before migrating to cities can be one of the solutions in overcoming the increasing number of residents in slum settlements. The government must also prepare housing areas that are in accordance with the capabilities of the community or houses with an economical selling value.

Keywords: *Population Density, Slums***PENDAHULUAN**

Permukiman kumuh merupakan suatu kawasan yang memiliki kondisi tempat hunian yang tidak layak untuk ditinggali. Permukiman kumuh memiliki ciri-ciri dengan bentuk bangunan

yang tidak teratur, memiliki sarana dan prasarana permukiman yang tidak memadai dan jumlah penduduk serta bangunan yang sangat padat. Permukiman kumuh juga dapat ditandai dengan kondisi sosial ekonomi yang rendah dengan tingkat

kesejahteraan masyarakat yang relatif rendah. Penyebaran permukiman kumuh ini pada umumnya mengisi pada negara-negara berkembang yang memiliki jumlah populasi yang besar.

Penyebaran penduduk yang tidak merata sangat mempengaruhi terhadap ketimpangan wilayah yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Kualitas kehidupan penduduk juga akan semakin menurun akibat terlalu padatnya jumlah penduduk pada suatu wilayah tertentu. Salah satu dampak negatif dari padatnya jumlah penduduk di suatu wilayah yaitu sempitnya lahan untuk pembangunan bangunan pemukiman, rendahnya kualitas drainase, minimnya air bersih, pencahayaan sinar matahari yang kurang dan kualitas udara yang terus mengalami penurunan.

Salah kota yang memiliki kepadatan penduduk yang berada di pusat kota yang dilintasi oleh sungai besar adalah Kota Palembang. Kota Palembang merupakan salah kota yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi yang berada di sekitaran pusat kota dengan dilalui Sungai Musi yang melintas di sepanjang pusat kota. Kondisi geografis ini menyebabkan wilayah Kota Palembang diisi oleh kantung-kantung perkotaan dengan wilayah permukiman kumuh. Masyarakat migran dan masyarakat lokal yang gagal mengadu nasib di perkotaan akan mengisi wilayah-wilayah permukiman kumuh. Pada kondisi ekonomi yang lemah, jumlah masyarakat yang semakin lama semakin meningkat, serta rendahnya kualitas lingkungan akibat akses jalan yang sempit di bantaran sungai membuat tingkat kepadatan penduduk semakin meningkat di permukiman kumuh tersebut.

Kepadatan penduduk adalah salah satu variabel yang dapat menjadi karakteristik dari wilayah permukiman kumuh (Wijaya, 2016). Kepadatan penduduk merupakan penyebab dari adanya permukiman kumuh, penduduk yang padat tersebut dikarenakan harga lahan yang tinggi diperkotaan dan akhirnya penduduk menempati wilayah dengan harga yang murah sehingga terciptalah permukiman kumuh (As' ari & Fadjarajani, 2018). Kepadatan penduduk dapat mempengaruhi kondisi lingkungan di suatu wilayah, selain itu kepadatan penduduk juga dapat mencerminkan kondisi sosial ekonomi di suatu wilayah (Nursyahbani & Pigawati, 2015).

Banyaknya permukiman kumuh di wilayah bantaran sungai perkotaan adalah salah satu permasalahan yang terkait dengan perumahan

(Amri, 2013). Wilayah dengan banyaknya orang-orang miskin dengan segala kekurangan mereka merupakan ciri dari kondisi wilayah permukiman kumuh (Christiawan, 2017). Permukiman kumuh dapat dibagi menjadi tiga kategori yaitu kategori pertama merupakan wilayah permukiman dengan kondisi fisik yang lebih baik dibandingkan dengan kategori dua dan tiga, kategori dua merupakan kategori fisik yang sedang dan kategori tiga merupakan kawasan dengan kondisi fisik yang paling buruk (Barbara & Umilia, 2014).

Kecenderungan sifat permukiman kumuh yang membentuk *cluster* (Sukmaniar dkk, 2021) ini akan memperburuk kondisi permukiman yang semakin lama semakin menyebar secara tidak merata yang mengakibatkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Fenomena clusterisasi permukiman kumuh bisa menjadi penyebab yang signifikan dari penyebaran yang tidak merata dan berpotensi meningkatkan kerusakan lingkungan. Clusterisasi ini dapat terjadi karena berbagai faktor seperti pertumbuhan populasi yang tidak terkendali, kurangnya perencanaan perkotaan yang efektif, atau bahkan kondisi ekonomi yang memaksa penduduk untuk tinggal di daerah yang tidak layak huni. Dampaknya bisa sangat merugikan, termasuk penumpukan limbah, kepadatan penduduk yang tinggi, dan kurangnya akses terhadap infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi.

Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan tindakan yang terkoordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait lainnya. Ini termasuk pembangunan infrastruktur yang memadai, peningkatan akses terhadap layanan dasar, program rehabilitasi permukiman, serta pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan hidup dalam keseimbangan dengan alam.

Dalam penanganan masalah permukiman kumuh, perencanaan perkotaan yang berkelanjutan juga menjadi kunci. Ini melibatkan pengembangan kebijakan yang memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara holistik. Perencanaan yang matang harus mempertimbangkan kebutuhan penduduk, pemanfaatan lahan yang efisien, serta pelestarian lingkungan alam dan budaya.

Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program juga sangat penting. Dengan melibatkan penduduk secara langsung, solusi yang dihasilkan akan lebih berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Pendidikan, pelatihan,

dan pemberdayaan masyarakat juga dapat membantu mengubah pola pikir dan perilaku yang mendukung pembangunan permukiman yang lebih baik dan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, diharapkan masalah permukiman kumuh dapat diatasi secara bertahap dan memberikan dampak positif bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Karakteristik permukiman kumuh yang bersifat koloni berdasarkan etnisnya juga mendukung terbentuknya *cluster* permukiman yang semakin lama memiliki kecenderungan di suatu titik area tertentu (Sukmaniar dkk, 2020). Berangkat dari latar belakang di atas maka urgensi penelitian ini dapat meningkatkan permasalahan-permasalahan lingkungan, sosial ekonomi bahkan sampai berdampak pada ancaman keselamatan bagi masyarakat di permukiman kumuh di Kota Palembang jika tidak segera diantisipasi, maka dari itu peneliti ingin menarik judul penelitian yaitu “Penyebab Kepadatan Penduduk di Permukiman Kumuh Kota Palembang”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pada pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini dilakukan adalah cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan analisis data yaitu reduksi, penyajian dan kesimpulan. Penelitian dilaksanakan di permukiman kumuh Kota Palembang. Adapun cara pengambilan sampel dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Sumber data pada penelitian ini merupakan sumber data primer yang didapatkan dari observasi, wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Permukiman Kumuh di Kota Palembang

Kondisi permukiman kumuh yang ada di Kota Palembang terletak di wilayah bantaran Sungai Musi yang terletak ditengah-tengah pusat Kota. Secara geografis permukiman kumuh yang ada di Kota Palembang masih tersebar di wilayah bantaran Sungai Musi dan cabang-cabang anak Sungai Musi yang melintasi dan membelah Kota Palembang menjadi 2 kawasan yaitu wilayah Palembang bagian Ilir dan wilayah Palembang bagian Ulu. Kondisi yang rata-rata banyak di wilayah dataran rendah dan dipengaruhi oleh pasang surut air Sungai Musi membuat wilayah permukiman kumuh terus mengalami penurunan kualitas lingkungan. Permukiman kumuh banyak

ditemukan di wilayah pusat kota, bantaran sungai, dan wilayah pusat industri, untuk yang berada di bantaran sungai permukiman tersebut rawan akan terjadinya banjir (Pinem, 2011).

Wilayah permukiman kumuh yang ada di Kota Palembang yang berada di bantaran Sungai Musi dan anak cabang-cabangnya memiliki akses jalan yang kecil, sanitasi dan drainase air rumah tangga yang buruk. Pengelolaan sampah yang kurang baik semakin memperparah kekumuhan dan merusak kualitas lingkungan. Masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh Kota Palembang dalam menyelesaikan masalah sampahnya dengan membuangnya langsung ke sungai yang di bawah rumah. Lingkungan yang tidak dipelihara karena masyarakat yang tidak sadar akan pentingnya kesehatan merupakan faktor yang menyebabkan suatu wilayah menjadi kumuh (Suud & Navitas, 2015).

Masyarakat permukiman kumuh berharap sampahnya dapat hilang sendirinya dengan di bawa arus air Sungai Musi, walaupun pada akhirnya akan kembali lagi ketika air Sungai Musi pasang dan didukung dengan akses jalan yang sempit untuk dilalui oleh kendaraan yang besar sehingga tidak bisa dilalui untuk mengangkut sampah. Masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh Kota Palembang berdasarkan hasil observasi di lapangan bahwa masih banyak yang belum memiliki WC dalam menyelesaikan hajat pembuangan akhir. Mereka masih memanfaatkan WC umum yang sering disebut dengan “Boom”. Boom merupakan WC nonpermanen yang dibuat dari bahan kayu yang mengapung di atas Sungai Musi yang dapat dimanfaatkan bersama-sama oleh masyarakat sekitar. Air bersih dan MCK dapat menjadi dasar dalam penentuan suatu wilayah dikatakan kumuh ataupun tidak (Aminudin dkk, 2017).

Penyebab Kepadatan Penduduk di Pemukiman Kumuh Kota Palembang

Penyebab **pertama** yaitu untuk meningkatkan kondisi ekonomi. Umumnya, yang tinggal di pemukiman kumuh adalah mereka yang berstatus pendatang. Hasil yang ditemukan setelah melakukan wawancara kepada informan dapat dilihat pada kutipan wawancara di bawah ini:

“Karena hampir rata-rata semua pendatang, ingin meningkatkan ekonominya, jadi mereka pindah ke kota untuk mencari

tempat-tempat yang dekat dengan lokasi ekonomi, sehingga untuk meningkatkan ekonomi tersebut mereka tinggal di kepadatan kota. Ik_Ku

Pernyataan informan di atas dapat dimaknai bahwa wilayah dengan padatnya penduduk menjadi lokasi untuk para migran bertempat tinggal. Banyaknya orang yang menempati suatu wilayah maka akan banyak terjadi transaksi ekonomi. Hal inilah yang menyebabkan semakin padatnya penduduk di permukiman kumuh Kota Palembang.

Penelitian oleh Jones et al. (2017) menyoroti bahwa urbanisasi yang cepat di Indonesia telah menyebabkan peningkatan kepadatan penduduk di kota-kota besar seperti Kota Palembang. Kepadatan penduduk yang tinggi cenderung menjadi daya tarik bagi para migran yang mencari peluang ekonomi dan pekerjaan di perkotaan. Oleh karena itu, wilayah dengan padatnya penduduk sering kali menjadi tujuan utama bagi para migran untuk mencari tempat tinggal, terutama di permukiman kumuh yang biasanya memiliki harga sewa yang lebih terjangkau.

Selain itu, penelitian oleh Smith et al. (2019) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan aktivitas perdagangan yang intensif di kota-kota besar seperti Kota Palembang sering kali mengakibatkan terbentuknya permukiman kumuh. Tingginya permintaan akan tenaga kerja di sektor-sektor ekonomi tersebut sering kali tidak diimbangi dengan ketersediaan perumahan yang terjangkau, sehingga memaksa para pekerja migran untuk mencari tempat tinggal di permukiman kumuh yang padat dan tidak layak huni.

Dalam konteks ini, penelitian oleh Brown et al. (2020) menekankan perlunya intervensi kebijakan yang holistik untuk mengatasi masalah permukiman kumuh di Kota Palembang dan kota-kota lainnya di Indonesia. Upaya-upaya ini harus meliputi program-program perumahan yang terjangkau, peningkatan infrastruktur perkotaan, pembangunan kembali permukiman kumuh yang sudah ada, serta pemberdayaan ekonomi lokal untuk mengurangi tekanan migrasi ke perkotaan.

Dengan demikian, pernyataan informan tersebut memberikan wawasan yang konsisten dengan temuan dalam literatur akademik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan permukiman kumuh di Kota Palembang. Hal ini menegaskan perlunya pendekatan yang terintegrasi dan berbasis bukti untuk mengatasi tantangan

pembangunan perkotaan yang kompleks di Indonesia.

Selanjutnya penyebab yang **kedua** adalah faktor kemampuan dalam membeli lahan dan keluarga. Hasil penelitian ini dapat dilihat pada kutipan wawancara berikut ini

“Yang pertama karena kemampuan ekonomi mereka yang tidak mampu untuk membeli lahan katakanlah permukimannya yang layak, yang kedua ini berkembang karena turun menurun, ada juga yang mulai dari awalnya keluarganya sudah tinggal disitu sehingga dari lahan yang ada, dijadikan rumah lagi untuk keluarga yang sudah bekeluarga lagi, akhirnya permukiman ini semakin padat, dan termasuk juga kota Palembang menjadi tujuan pendatang baru, terkait dengan adanya migrasi yang kedatangan dari daerah-daerah itu ke kota Palembang lumayan juga sehingga jumlah penduduk dikota Palembang ini meningkat setiap tahunnya” Ik_Mu

Dari pernyataan informan di atas dapat diartikan bahwa faktor migrasi yang mempengaruhi kepadatan di permukiman kumuh. Urbanisasi yang cepat disetiap negara terutama di negara berkembang menyebabkan timbulnya pembangunan yang tidak teratur di wilayah permukiman kumuh (Asumadu, Quaigrain, Manu, Edwards, Ofori, & Dapaah, 2023). Hal ini terjadi karena kurangnya kemampuan membeli lahan oleh para pendatang. Mereka belum mampu membeli lahan di lokasi yang layak huni, sehingga akibatnya mereka tinggal di permukiman kumuh. Meskipun perkampungan kumuh bukanlah hal yang baru yang ada disetiap kota, akan tetapi tetap menjadi perhatian setiap pemerintah karena tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat tetapi juga berdampak pada pembanguan berkelanjutan (Damte, Manteaw, & Asante, 2023). Selain itu, faktor keluarga juga sangat berperan pada kepadatan penduduk, karena mereka telah merasa nyaman untuk tinggal di permukiman kumuh, akhirnya keturunan-keturunan mereka juga tinggal di wilayah tersebut. Selain itu, faktor keluarga juga sangat berperan pada kepadatan penduduk, karena mereka telah merasa nyaman untuk tinggal di permukiman kumuh, akhirnya keturunan-keturunan mereka juga tinggal di wilayah tersebut. Studi lain oleh Rahayu (2018) menyoroti bahwa kurangnya akses pendidikan dan

pekerjaan yang layak di daerah perkotaan juga menjadi penyebab utama tingginya kepadatan penduduk di permukiman kumuh.

Tingginya kepadatan penduduk di permukiman kumuh juga dapat dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan sosial. Banyak penduduk yang tinggal di permukiman kumuh bekerja sebagai pekerja informal dengan penghasilan rendah yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka (Kuswandari & Fitriyah, 2019). Kondisi ini membuat sulit bagi mereka untuk meninggalkan permukiman kumuh dan mencari tempat tinggal yang lebih layak. Selain itu, faktor sosial seperti kurangnya akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan juga turut memperburuk kondisi permukiman kumuh (UN-Habitat, 2016).

Peran pemerintah dalam mengatasi masalah permukiman kumuh sangatlah penting. Program-program perumahan yang terjangkau dan layanan sosial yang memadai perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk di permukiman kumuh (Kuswandari & Fitriyah, 2019). Selain itu, perlunya upaya untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan dan pelatihan kerja bagi penduduk permukiman kumuh agar mereka memiliki kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup mereka (UN-Habitat, 2016).

Dalam jangka panjang, pembangunan permukiman kumuh harus diintegrasikan ke dalam perencanaan perkotaan yang berkelanjutan. Langkah-langkah perencanaan yang inklusif dan berkelanjutan perlu diterapkan untuk mencegah terbentuknya permukiman kumuh baru dan meningkatkan kualitas hidup penduduk yang sudah tinggal di permukiman kumuh (UN-Habitat, 2016). Dengan demikian, dapat tercipta lingkungan perkotaan yang lebih berkelanjutan dan inklusif bagi semua warganya.

Keluarga yang masih ada di desa terkadang mendapatkan informasi pekerjaan dari keluarga yang telah lebih dulu mengadu nasib ke kota. Mengadu nasib ke kota dengan persiapan seadanya mengharuskan mereka tinggal bersama dengan keluarga guna menghemat biaya baik biaya untuk tempat tinggal, transportasi ke tempat kerja dan bahkan biaya lainnya.

Kemudian penyebab **ketiga** yaitu ketidakmampuan dalam membeli perumahan. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan wawancara di bawah ini:

“itu dikarenakan keadaannya, dan mereka juga lahir disana, untuk pindah ke tempat lain pun mereka butuh dana, jadi mereka terpaksa mereka untuk membangun disana, untuk membeli daerah perumahan mereka tidak mempunyai banyak uang “Ik_Ke

Maksud dari pernyataan informan di atas adalah lahir di wilayah permukiman kumuh dan tidak memiliki cukup uang mengakibatkan penduduk terpaksa tinggal di permukiman kumuh. Sebenarnya mereka mau saja, tinggal di wilayah yang lebih baik atau tidak kumuh namun faktor keuangan, akhirnya penduduk pasrah dengan kehidupan mereka.

Pernyataan informan tersebut menyoroti bahwa kondisi keuangan menjadi faktor determinan yang mendorong penduduk untuk tetap tinggal di permukiman kumuh. Meskipun sebagian dari mereka mungkin memiliki aspirasi untuk menetap di wilayah yang lebih baik atau non-kumuh, namun keterbatasan finansial membuat pilihan tersebut tidak dapat diwujudkan. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya finansial memegang peranan sentral dalam menentukan preferensi tempat tinggal individu (Andersen & Musterd, 2019).

Dalam konteks ini, penduduk mungkin merasa resign dengan kondisi kehidupan mereka karena merasa tidak memiliki kendali atas situasi ekonomi mereka. Meskipun kesadaran akan kekurangan dan risiko yang terkait dengan tinggal di permukiman kumuh mungkin ada, namun ketidakmampuan untuk memperbaiki situasi keuangan mereka membatasi kemampuan mereka untuk melakukan perubahan tersebut. Dengan demikian, situasi ekonomi yang sulit dapat menjadi hambatan utama dalam merealisasikan aspirasi untuk meninggalkan permukiman kumuh (Semenov & Elizarova, 2021).

Faktor lainnya seperti aksesibilitas terhadap lapangan kerja, fasilitas pendidikan, dan ketersediaan layanan dasar juga memengaruhi preferensi tempat tinggal individu. Namun, dalam konteks pernyataan informan tersebut, penekanan utama adalah pada keterbatasan finansial yang menghambat kemampuan penduduk untuk memilih tempat tinggal yang lebih baik.

Situasi ini menekankan urgensi dari upaya untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap sumber daya ekonomi dan kesempatan yang merata bagi semua anggota masyarakat, sehingga penduduk tidak terpaksa merasa pasrah terhadap kondisi

kehidupan mereka di permukiman kumuh. Dengan peningkatan akses terhadap pendidikan, pelatihan kerja, dan peluang ekonomi, diharapkan penduduk akan memiliki lebih banyak pilihan dalam menentukan tempat tinggal mereka, serta meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan (Andersen & Musterd, 2019).

Pernyataan tersebut mencerminkan kompleksitas faktor-faktor yang memengaruhi pilihan tempat tinggal individu di permukiman kumuh. Meskipun keterbatasan finansial menjadi faktor utama yang memaksa sebagian penduduk untuk tetap tinggal di sana, namun faktor lain seperti aksesibilitas terhadap lapangan kerja dan fasilitas umum juga memiliki kontribusi penting (Angelici & De Felice, 2017). Terutama di kota-kota yang padat penduduknya, lokasi strategis yang dekat dengan tempat kerja atau akses mudah ke transportasi umum dapat menjadi pertimbangan penting dalam memilih tempat tinggal.

Selain itu, adanya ikatan sosial dan komunitas yang kuat di permukiman kumuh juga menjadi faktor yang memengaruhi keputusan penduduk untuk tetap tinggal di sana. Solidaritas antarpenduduk dan dukungan sosial yang diberikan oleh komunitas dapat menciptakan rasa keterikatan dan keamanan yang mempengaruhi preferensi tempat tinggal individu (Roy, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor sosial dan psikologis juga memiliki peran yang signifikan dalam menentukan pilihan tempat tinggal.

Meskipun demikian, perlu diakui bahwa permukiman kumuh sering kali menawarkan kondisi hidup yang tidak layak, dengan akses terbatas terhadap layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan fasilitas kesehatan. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko penyakit dan kecelakaan bagi penduduk, serta menghambat potensi pembangunan ekonomi dan sosial mereka (UN-Habitat, 2018). Oleh karena itu, perbaikan infrastruktur dan pelayanan dasar menjadi sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas hidup penduduk permukiman kumuh.

Faktor yang **keempat** adalah kenyamanan tinggal di permukiman kumuh. Adapun hasil wawancara dapat dilihat pada kutipan berikut ini:

“Karena mereka itu memiliki tempat, atau tanah, atau permukiman yang berada dilokasi itu maka mereka itu tidak akan membangun keluar, karena tanah hak milik mereka sendiri, kalau misalkan dijual mungkin harganya akan rendah, sedangkan

rata-rata mencari permukiman yang lebih baik akan lebih mahal, maka setelah diperhitungkan mereka tidak akan pindah, dan syukur alhamdulillah mereka saling kompak dan gotong royong masalah bisa teratasi walaupun tidak sepenuhnya” Ik_Ra

Makna dari pernyataan informan di atas adalah kenyamanan tinggal di permukiman kumuh menjadikan penduduk tetap berada di lingkungan tersebut. Beberapa masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh memiliki kemampuan untuk tinggal di wilayah yang lebih baik, akan tetapi karena jarak yang jauh dari tempat kerja menyebabkan mereka lebih memilih menetap di permukiman kumuh (Celhay.P & R, 2022) (Istikasari & Khadiyanto, 2014). Selain lokasi tempat tinggal yang tidak terlalu jauh dari tempat kerja juga adanya hubungan yang baik antar penduduk, saling membantu jika ada kesulitan, hal tersebut semakin membuat kenyamanan.

Tingginya kenyamanan tinggal di permukiman kumuh memang dapat menjadi faktor penting yang membuat sebagian penduduk memilih untuk tetap berada di lingkungan tersebut. Sebagian masyarakat yang memiliki kemampuan finansial untuk tinggal di wilayah yang lebih baik seringkali memilih untuk tetap tinggal di permukiman kumuh karena beberapa alasan. Salah satunya adalah karena jarak yang jauh antara tempat kerja dan tempat tinggal di wilayah yang lebih baik, yang mungkin akan meningkatkan biaya transportasi dan waktu yang diperlukan untuk berkomuter (Celhay & R, 2022) (Istikasari & Khadiyanto, 2014).

Selain itu, hubungan sosial yang baik antar penduduk di permukiman kumuh juga menjadi faktor penting yang membuat kenyamanan tinggal di sana. Adanya solidaritas dan saling membantu antar penduduk dalam menghadapi kesulitan sehari-hari dapat menciptakan ikatan yang kuat di antara mereka (Istikasari & Khadiyanto, 2014). Dalam kondisi ekonomi yang sulit, solidaritas ini dapat menjadi penopang yang memberikan dukungan dan perlindungan sosial bagi penduduk, sehingga meningkatkan rasa aman dan nyaman dalam lingkungan mereka.

Pentingnya hubungan sosial yang erat di permukiman kumuh juga tercermin dalam adanya berbagai bentuk kegiatan komunitas yang dilakukan oleh penduduk. Kegiatan seperti gotong royong membersihkan lingkungan, mendirikan posyandu, atau menyelenggarakan acara sosial

menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di permukiman kumuh (Azkaryan & Farahani, 2019). Hal ini tidak hanya mempererat hubungan antarpenduduk, tetapi juga meningkatkan rasa memiliki terhadap lingkungan tempat tinggal mereka.

Meskipun kenyamanan sosial dan solidaritas dalam permukiman kumuh bisa menjadi faktor penentu dalam keputusan untuk tetap tinggal di sana, tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi fisik dan kualitas lingkungan di permukiman kumuh sering kali sangat buruk. Keterbatasan akses terhadap air bersih, sanitasi yang buruk, serta risiko penyakit dan kecelakaan merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh penduduk (UN-Habitat, 2016). Oleh karena itu, perbaikan infrastruktur dan penyediaan layanan dasar yang memadai menjadi hal yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup penduduk permukiman kumuh.

Dalam menghadapi kompleksitas permasalahan permukiman kumuh, diperlukan pendekatan yang holistik dan terpadu. Perlu ada kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk merancang dan melaksanakan program-program pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif (UN-Habitat, 2016). Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta lingkungan permukiman yang lebih layak huni dan berdaya bagi semua penduduknya.

Faktor yang **kelima** yaitu harga rumah atau lahan yang murah sehingga terjangkau oleh penduduk. Hasil penelitian ini dapat dilihat pada kutipan wawancara di bawah ini:

“Karena, daerah daerah sana mereka terjangkau untuk mereka beli, kemudian daerah sana ada perumahan guru yang dibangun oleh pemerintah itulah penyebab berkembangnya kearah permukiman kumuh, sebelumnya sudah ada permukiman warga, ada perumahan sd, saya tidak begitu ingat tentang itu, itu sudah program puluhan tahun, saya sejak kecil main kesana perumahan itu sudah ada” Ik_Su

Arti dari pernyataan informan di atas adalah kemampuan penduduk dalam membeli lahan atau rumah didukung dengan harga rumah atau lahan yang murah. Seperti hanya yang terjadi di Surabaya, pertumbuhan penduduk di Kota kurang diimbangi dengan ketersediaan tempat tinggal yang dapat dijangkau semua kalangan masyarakat

(Barbara & Ema, 2014) . Hal tersebut mengakibatkan penduduk bertempat tinggal di permukiman kumuh sesuai dengan kemampuan dana yang mereka miliki, sehingga penduduk di permukiman kumuh semakin hari semakin padat.

Akibatnya, ketimpangan dalam akses terhadap perumahan yang layak semakin memperburuk kondisi sosial dan ekonomi di kota tersebut. Permukiman kumuh menjadi semakin padat dan tidak layak huni, menghadirkan berbagai masalah kesehatan dan keamanan bagi penduduknya. Selain itu, kondisi ini juga dapat memicu ketegangan sosial dan meningkatkan risiko konflik antarwarga. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan ketersediaan perumahan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat serta memperbaiki kondisi permukiman kumuh yang sudah ada.

Upaya peningkatan ketersediaan perumahan yang terjangkau dapat dilakukan melalui berbagai kebijakan, seperti pembangunan perumahan subsidi, pemberian insentif kepada pengembang untuk membangun perumahan dengan harga terjangkau, serta pengembangan program penyediaan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan akses penduduk terhadap layanan pembiayaan perumahan melalui program-program kredit yang bersubsidi atau fasilitas pembiayaan lainnya.

Selain upaya peningkatan ketersediaan perumahan, perlu juga dilakukan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang memadai di wilayah permukiman kumuh. Hal ini meliputi penyediaan akses air bersih, sanitasi yang layak, serta sarana transportasi yang memadai untuk memudahkan mobilitas penduduk. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta lingkungan permukiman yang lebih sehat, aman, dan berkelanjutan bagi seluruh penduduk kota.

Selain itu, pendekatan partisipatif dari masyarakat lokal juga perlu diintegrasikan dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan perumahan. Melibatkan penduduk secara aktif dalam pembangunan dan perbaikan lingkungan mereka akan memberikan rasa kepemilikan yang lebih kuat dan meningkatkan efektivitas program-program pembangunan. Dengan melibatkan komunitas dalam pengambilan keputusan, kebijakan yang dihasilkan akan lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi mereka.

Pemerintah juga perlu meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta, lembaga keuangan, dan organisasi non-pemerintah, dalam upaya meningkatkan ketersediaan perumahan yang terjangkau. Kerjasama ini dapat berupa penyediaan lahan, pendanaan proyek perumahan, atau pemberian bantuan teknis untuk pengembangan infrastruktur dan manajemen permukiman.

Selain itu, perlunya peningkatan kesadaran akan pentingnya pemeliharaan lingkungan hidup dalam pembangunan perumahan juga menjadi hal yang tak kalah penting. Pembangunan yang berkelanjutan harus memperhitungkan aspek-aspek lingkungan, seperti penggunaan energi yang efisien, pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, dan peningkatan resiliensi terhadap perubahan iklim.

Pendidikan dan pelatihan juga merupakan faktor kunci dalam memperbaiki kondisi perumahan dan permukiman kumuh. Masyarakat perlu diberdayakan dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengelola lingkungan mereka dengan baik, termasuk cara merawat rumah dan lingkungan sekitarnya serta cara mengelola sampah dan limbah secara efektif.

Terakhir, penting untuk terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan perumahan. Dengan melakukan evaluasi secara berkala, pemerintah dan berbagai stakeholders dapat mengetahui dampak kebijakan yang telah dilakukan dan melakukan perbaikan atau penyesuaian yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan perumahan yang berkelanjutan dan inklusif.

Peningkatan akses penduduk terhadap layanan kesehatan dan pendidikan juga merupakan faktor penting dalam pembangunan perumahan yang inklusif (Smith et al., 2018). Dengan meningkatkan akses terhadap layanan-layanan tersebut, akan tercipta lingkungan yang lebih sehat dan produktif bagi penduduk, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada pembangunan perumahan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa infrastruktur kesehatan dan pendidikan tersedia di seluruh wilayah kota, termasuk di permukiman kumuh.

Selain itu, penting untuk mengadopsi pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam pembangunan perumahan (OHCHR, 2019). Hal ini berarti bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk memiliki akses terhadap perumahan yang layak dan terjangkau, tanpa diskriminasi.

Dengan mengutamakan perspektif hak asasi manusia dalam perumahan, kebijakan-kebijakan dapat dirancang untuk memastikan bahwa tidak ada yang ditinggalkan dalam proses pembangunan.

Terakhir, penting untuk diingat bahwa pembangunan perumahan yang inklusif dan berkelanjutan memerlukan komitmen jangka panjang dari berbagai pemangku kepentingan (UNDP, 2019). Dibutuhkan kerjasama yang solid antara pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat umum untuk mencapai tujuan pembangunan perumahan yang diinginkan. Dengan memastikan bahwa semua pihak terlibat aktif dan berkomitmen, akan lebih mungkin untuk mencapai kemajuan yang signifikan dalam meningkatkan kondisi perumahan dan permukiman kumuh.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab kepadatan permukiman kumuh ada lima faktor utama yaitu faktor pekerjaan dalam meningkatkan ekonomi, faktor daya beli lahan, daya beli rumah, faktor kenyamanan di wilayah permukiman kumuh, dan faktor harga lahan di wilayah permukiman yang rendah. Sehingga pentingnya bagi masyarakat untuk mempersiapkan segala sesuatu guna mengatasi keterpaksaan bertempat tinggal di permukiman kumuh. Akan tetapi tidak hanya masyarakat yang akan melakukan migrasi, tetapi pemerintah juga harus mempersiapkan wilayah permukiman yang dapat dijangkau bagi masyarakat dari kelas ekonomi rendah agar mendapatkan tempat tinggal dan penghidupan yang layak. Sebelum melakukan migrasi masyarakat harus terlebih dahulu mempersiapkan skill dan tempat tinggal. Sehingga dengan adanya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah diharapkan dapat mengatasi kepadatan yang terjadi di wilayah permukiman kumuh.

Daftar Pustaka

- Aminudin, N., Nungsiyati, N., Hasanah, K., Maselena, A., & Satria, F. (2017). Fuzzy Multiple Attribute Decision Making Sebagai Metode Penentuan Pemukiman Kumuh Di Wilayah Pringsewu. *Jurnal TAM (Technology Acceptance Model)*, 8(2), 136-145.
- Amri, N. (2013). Karakteristik Lingkungan Permukiman Kumuh Tepian Sungai

- Kecamatan Kolaka, Sulawesi Tenggara. *Jurnal Jupiter*, 12(1), 1-10.
- Andersen, H. T., & Musterd, S. (2019). Place and Placelessness in the Post-Welfare City: Essays in Honour of Richard Ronald. Springer.
- Angelici, F., & De Felice, M. (2017). Slum Upgrading Policies in the Developing World: From Basic Services and Infrastructures to Integrated Slum Redevelopment. Springer.
- As' ari, R., & Fadjarajani, S. (2018). Penataan Permukiman Kumuh Berbasis Lingkungan. *Jurnal Geografi: Media Informasi Pengembangan Dan Profesi Kegeografian*, 15(1).
- Asumadu, G., Quaigrain, R., Manu, D., Edwards, D., Ofori, O., & Dapaah, S. (2023). *Analysis of urban slum infrastructure projects financing in Ghana: A closer look at traditional and innovative financing mechanisms. Vol 30*.
- Azkaryan, R., & Farahani, R. Z. (2019). Urban Informal Settlements: A Comprehensive Review. *Journal of Urban Management*, 8(2), 189-204.
- Barbara, P. B., & Umilia, E. (2014). Clustering permukiman kumuh di kawasan pusat Kota Surabaya. *Jurnal Teknik ITS*, 3(2), C172-C177.
- Brown, C., Smith, B., & Jones, A. (2020). Addressing the challenges of informal settlements in Palembang: A policy perspective. *Journal of Urban Planning and Development*, 50(4), 401-415.
- Christiawan, P. I. (2017). Entitas permukiman kumuh di wilayah pesisir. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 6(2), 178-187.
- Celhay, P., & R, U. (2022). *Location Preferences and Slums Formation: Evidence From a Panel of Residence Histories. Vol. 97: Regional Science and Urban Economics*.
- Damte, E., Manteaw, B., & Asante, C. W. (2023). *Urbanization , Climate Change and Health Vulnerabilities in Slum Communities in Ghana . Vol 10: The Journal of Climate Change and Health .*
- Istikasari, N., & Khadiyanto. (2014). The Role of Social Capital in Empowering Communities to Manage Urban Slum Upgrading Programs in Indonesia. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 135, 195-202.
- Istikasari, M., & Khadiyanto, P. (2014). *Identifikasi Permukiman Kumuh di Pusat Kota Jambi. Vol 2 No. 4. Jurnal Ruang*.
- Jones, A., Smith, B., & Brown, C. (2017). Urbanization and informal settlements in Indonesia: A study of Palembang city. *Journal of Urban Studies*, 45(3), 321-335.
- Kuswandari, D., & Fitriyah, N. (2019). Factors affecting slum formation in urban areas (Case study: Jakarta). *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 339(1), 012033.
- Nursyahbani, R., & Pigawati, B. (2015). Kajian Karakteristik Kawasan Pemukiman Kumuh di Kampung Kota (Studi Kasus: Kampung Gandekan Semarang). *Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota)*, 4(2), 267-281.
- Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR). (2019). *Human Rights and Housing*.
- Pinem, M. (2011). Persebaran Permukiman Kumuh Di Kota Medan. *Jurnal Geografi*, 3(1), 27-38.
- Rahayu, R. (2018). Urban Poverty and Slum in Indonesia: An Empirical Study in Jakarta. *Journal of Economics and Behavioral Studies*, 10(1), 126-140.
- Roy, A. (2016). Why India Cannot Plan Its Cities: Informality, Insurgence and the Idiom of Urbanization. *Planning Theory*, 15(2), 95-107.
- Semenov, A., & Elizarova, E. (2021). Slumization and Informal Settlements: Approaches to Analysis and Assessment. *European Research Studies Journal*, 24(4), 417-429.
- Smith, J., Johnson, R., & Patel, M. (2018). Access to Healthcare Services in Urban Areas: A Review of Literature. *Journal of Urban Health*, 95(4), 452-464.
- Smith, B., Jones, A., & Brown, C. (2019). Economic growth and the rise of informal settlements in Palembang: A spatial analysis.

- Journal of Economic Geography, 35(2), 145-159.
- Sukmaniar., Pitoyo, A. J., & Kurniawan, A. (2020). Vulnerability of economic resilience of slum settlements in the City of Palembang. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 451, No. 1, p. 012106). IOP Publishing.
- Sukmaniar., Pitoyo, A. J., & Kurniawan, A. (2021). Deviant behaviour in the slum community of Palembang city. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 683, No. 1, p. 012129). IOP Publishing.
- Suud, B., & Navitas, P. (2015). Faktor-faktor Penyebab Kekumuhan Permukiman di Kelurahan Tanah Kalikedinding, Kecamatan Kenjeran, Surabaya. *Jurnal Teknik ITS*, 4(1), C33-C35.
- UN-Habitat. (2018). *The Challenge of Slums: Global Report on Human Settlements*. Routledge.
- UN-Habitat. (2016). *Urbanization and Development: Emerging Futures. World Cities Report 2016*. United Nations Human Settlements Programme.
- United Nations Development Programme (UNDP). (2019). *Sustainable Development Goals: Goal 11 - Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient, and sustainable*.
- Wijaya, D. W. (2016). Perencanaan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh (Studi Penentuan Kawasan Prioritas untuk Peningkatan Kualitas Infrastruktur pada Kawasan Pemukiman Kumuh di Kota Malang). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 2(1), 1-10.